KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menagih transparansi para wakil rakyat
Tanggal : Senin, 03 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Menagih Transparansi para Wakil Rakyat

Ketertutupan informasi publik terkait penganggaran ditambah lemahnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas kinerja parlemen menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Cahya Mulyana
cahya@mediaindonesia.com

KOMITMEN DPR RI melakukan transparansi dalam menggunakan anggaran publik kembali dipertanyakan. Walaupun sudah menyatakan komitmennya bersama 180 parlemen negara di dunia, hingga saat ini lembaga tersebut belum mau transparan dan aspiratif dalam pembahasan budgeting dan pengelolaan anggaran.

DPR, terutama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), terkesan selalu menutup akses publik yang ingin mengetahui penggunaan uang rakyat untuk kepentingan rutinnya, termasuk pula dana reses yang sering kali tidak jelas pertanggungjawabannya.

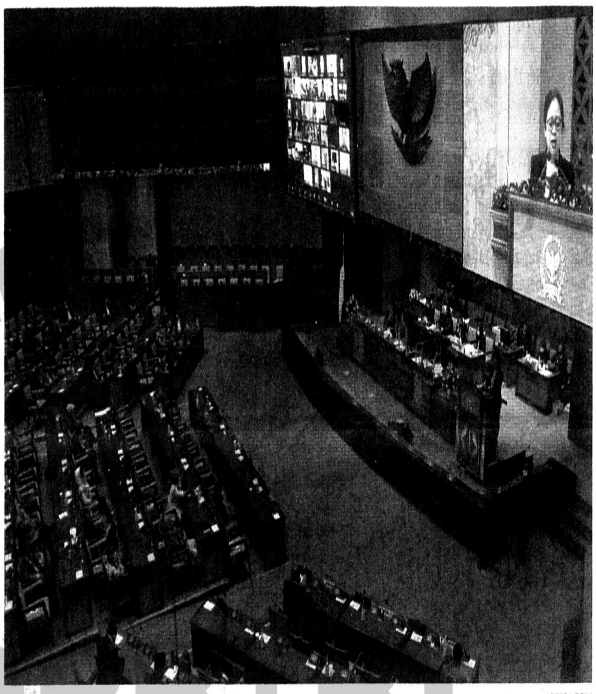
Menurut Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran itu sebagai bukti bahwa DPR mengabaikan prinsip keterbukaan. Satu di antaranya, yaitu anggaran perjalanan dinas anggota DPR yang dinilainya sudah tak sesuai dengan semangat tata kelola keuangan negara. "DPR memiliki reputasi buruk sebagai lembaga publik yang kurang dipercaya bahkan beberapa survei publik menilai DPR sebagai lembaga terkorup," ujarnya pada webinar, beberapa waktu lalu.

Seharusnya, tambah Roy, selaku perpanjangan tangan, lidah, dan harapan rakyat, DPR semestinya bekerja dan bertindak berlandaskan prinsip keterbukaan. "Ketertutupan informasi publik terkait penganggaran ditambah lemahnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas kinerja parlemen menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR," ungkapnya.

Di sisi lain, BURT DPR membantah berbagai tudingan yang dialamatkan ke pihak mereka. Wakil Ketua BURT Ahmad Dimyati Natakusumah mengeklaim lembaganya lebih transparan jika dibandingkan dengan pemerintah dalam hal penggunaan anggaran. "Daripada pemerintah, DPR lebih terbuka dan transparan," katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan keterbukaan penggunaan anggaran DPR dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan berbagai pihak, seperti penggunaan anggaran reses yang diawasi masyarakat. "Kalau DPR sebagai wakil rakyat, jadi rakyat itu tahulah, terutama konstituennya. Yang lebih kritis itu konstituen," ungkap dia.

Ia menjelaskan para anggota DPR mendapat pengawasan dari fraksi ketika menggunakan dana reses karena bisa memengaruhi suara partai saat pemilu. "Jadi, reses kalau tidak dilaksanakan tidak benar, itu berat di 2024. Nanti partainya akan marah," pungkasnya.



MI/MOH IRFAN

ANGGARAN DPR RI RP7,990 TRILIUN: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan masa sidang setelah penyerahkan berkas Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2022 pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, beberapa pekan lalu. DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2022 sebesar Rp7,990 triliun setelah mendapatkan penjelasan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. triliun.

Abaikan BPK

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) M Djadijono menilai DPR sering kali mengabaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) hanya fokus menelaah pengelolaan subsidi energi dan DAK. Dengan kata lain, tidak seluruh temuan BPK ditelaah BAKN. Bahkan, terkait kerugian negara yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah juga luput dari penelaahan oleh BAKN," ujarnya.

Ia mengungkapkan BPK banyak memberikan rekomendasi terhadap sejumlah komisi di DPR untuk menindaklanjuti temuan pertanggungjawaban keuangan oleh kementerian/lembaga. Selama masa sidang III TS 2020-2021, hanya ditemukan empat komisi yang memberikan perhatian terhadap temuan-temuan BPK, yaitu Komisi I, V, IV dan VII. Padahal, kata dia, temuan BPK sangat fantastis, yakni menyangkut pinjaman dalam negeri dan pembiayaan luar negeri pada 2020 sebesar Rp1.225,99 triliun. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit.

Menanggapi itu, Dimyati kembali menyatakan penggunaan anggaran DPR secara keseluruhan disampaikan kepada BPK, Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Bahkan, DPR berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-12 pada 2019. "Termasuk (penghargaan) dari Menpan-Rebiro. Penghargaan kita banyak, jadi enggak ada yang enggak transparan," ungkapnya. (MGN/P-3)

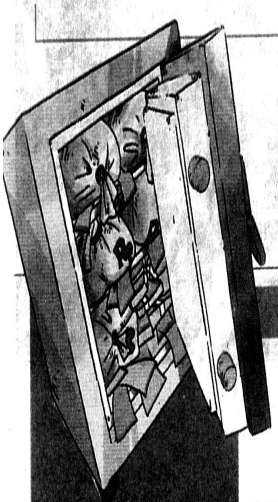
Besarnya Pendapatan Anggota DPR

Gaji Pokok DPR

- Ketua merangkap anggota: **Rp5.040.000**
- Wakil ketua merangkap anggota: **Rp4.620.000**
- Anggota: **Rp4.200.000**

Tunjangan

- Tunjangan istri: **10%** dari gaji pokok
- Tunjangan anak: **2%** dari gaji pokok
- Uang sidang paket: **Rp2.000.000**
- Tunjangan jabatan:
  - Ketua DPR: **Rp18.900.000**
  - Wakil Ketua DPR: **Rp15.600.000**
  - Anggota: **Rp9.700.000**
- Tunjangan beras perbulan: **Rp30.900**
- Tunjangan PPh Pasal 21: **Rp.2.699.813**
- Tunjangan kehormatan:
  - Ketua DPR: **Rp6.690.000**
  - Wakil Ketua DPR: **Rp6.450.000**
  - Anggota: **Rp5.580.000**
- Tunjangan komunikasi:
  - Ketua DPR: **Rp16.468.000**
  - Wakil Ketua DPR: **Rp16.009.000**
  - Anggota: **Rp15.554.000**
- Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran:
  - Ketua DPR: **Rp5.250.000**
  - Wakil Ketua DPR: **Rp4.500.000**
  - Anggota: **Rp3.750.000**



Belanja DPR dalam APBN 2021

- Outlook 2020: **Rp4,9 miliar**
- APBN 2021: **Rp6,0 miliar**

Dana Serap Aspirasi Anggota DPR

- Mendapatkan dana Rp20 juta/kegiatan.
- Maksimal 20 kegiatan yang dapat dilakukan.
- Total dana aspirasi yang bisa didapatkan anggota DPR ialah Rp400 juta.

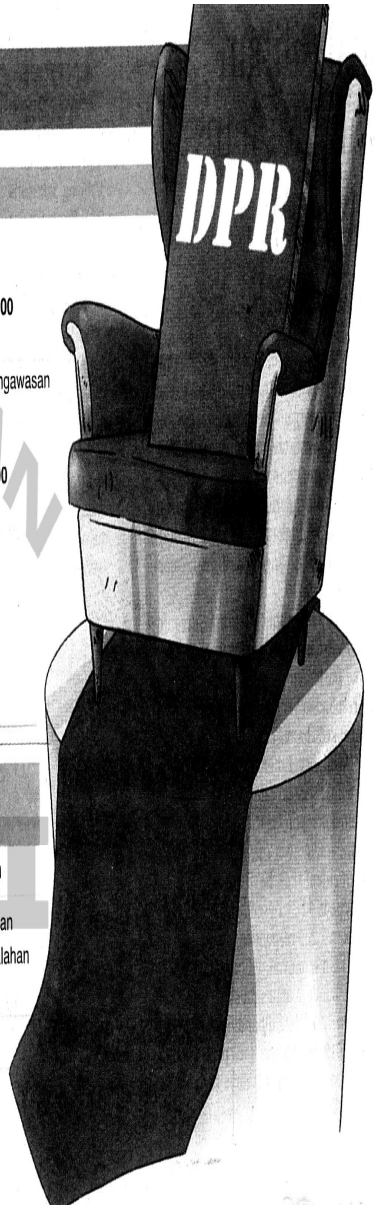
Hasil Dana Aspirasi

- Menyerap aspirasi masyarakat.
- Kedisiplinan anggota dewan.
- Transparansi penggunaan dana.

Temuan BPK

(Masa sidang III TS 2020-2021)

- Pembiayaan luar negeri 2020: Rp1.225,99 triliun
- Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan: 7.512 permasalahan (dengan kerugian Rp1,94 triliun)
- Potensi kerugian negara: Rp776,45 miliar
- Kekurangan penerimaan negara: Rp5,55 triliun



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Anggaran tidak Mungkin Digunakan Semau-maunya

DPR terus dikritik mengenai penggunaan anggaran yang rentan korupsi. Bagaimana Anda meresponsnya?

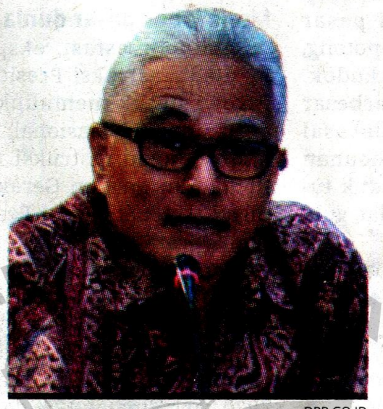
Ini soal akuntabilitas dan itu merupakan keniscayaan. Jadi, apa pun kebijakan yang termasuk penggunaan anggaran harus bisa dilihat di berbagai platform yang disediakan DPR. Itu artinya transparansi dan akuntabilitas sudah dilakukan DPR.

Bukankah memang rentan anggaran yang bergitu besar yang diterima anggota DPR tidak digunakan sebagaimana mestinya?

Anggaran itu sudah diatur dalam UU dan peraturan pemerintah. Dalam penggunaanya, kami wajib melaporkan kepada Sekretariat DPR. Tidak mungkin tidak. Dan Sekretariat DPR, kan, dapat penilaian dari BPK. Jadi, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan kepada negara.

Bagaimana teknisnya, Sekretariat DPR mendatangi anggota DPR untuk ambil laporannya atau bagaimana?

Iya. Staf kesekretariatan DPR pasti meminta laporannya kepada kami, seperti perjalanan dinas juga reses. Pokoknya yang menggunakan uang rakyat itu selalu diminta



DPR.GO.ID

Guspardi Gaus
Anggota Komisi II DPR

kesekretriatan untuk menyampaikan penggunaan anggaran itu.

Apakah pernah anggaran yang diberikan melebihi dari yang dibutuhkan?

Ya, tidak mungkin. Anggaran itu dibuat sudah sesuai dengan apa yang harus kami lakukan. Jadi, tidak mungkin lebih atau mau pergi perjalanan dinas semau-maunya anggota DPR sendiri.

Bagaimana jika ada celah tersebut?

Setiap penggunaan anggaran sudah ada aturan, bukan hanya di DPR, di setiap lembaga/kementerian juga harus ada pertanggungjawabannya yang kemudian diperiksa BPK.

> Penggunaan anggaran harus bisa dilihat di berbagai platform yang disediakan DPR.

Selain sekretariat, apakah laporan ke pihak lain juga?

Tidak ada laporan kami ke lembaga lain.

Jadi, dapat dipastikan, ya?

DPR dalam menggunakan anggaran dipastikan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam UU dan peraturan pemerintah. Di sana sudah secara tegas disampaikan.

Dengan kritik serupa yang bisa muncul lagi, apa yang harus dibenahi?

Semua berproses. Kami butuh untuk diawasi. Jika ada kritik, silakan disampaikan. (Sru/P-3)

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Transparansi Anggaran Jadi PR Besar

BAGAIMANA sejauh ini Anda menilai keterbukaan DPR yang sejak 2018 mendeklarasikan diri sebagai *open parliament*?

DPR sebagai badan publik itu memiliki kewajiban membuka informasi publik kepada masyarakat. Walaupun lembaga pembuat aturan, seharusnya mereka tidak kemudian bertindak semaunya sendiri. Sebagai badan publik, mestinya (DPR) menjadi teladan dan contoh yang baik bagi lembaga-lembaga negara yang lain. Idealnya menjadi contoh, tetapi faktanya tidak begitu. Anggaran-anggaran yang dikelola anggota dewan atau fraksi atau komisi itu tidak ada keterbukaan sama sekali.

Mengapa Anda beranggapan penggunaan anggaran DPR sama sekali belum terbuka?

Bagi kami, transparansi anggaran DPR ini masih menjadi persoalan serius meski sudah ada *open parliament* sebagai komitmen keterbukaan. *Open parliament* ini merupakan komitmen, tetapi pada praktiknya kalau kita bicara spesifik anggaran, keterbukaannya masih sangat buruk. Beberapa kegiatan sudah dipublikasi di *website* resmi DPR, tapi untuk pengelolaan anggaran itu yang masih sangat lemah.



DOK MI/ADI MAULANA

Badiul Hadi
Manajer Riset Seknas Fitra

Komponen apa saja yang perlu dibuka ke publik?

Yang langsung dikelola anggota dewan, seperti dana reses, itu akan menjadi sangat menarik kalau dipublikasi. Benar enggak, sih, mereka datang ke dapil. Kalaupun datang, kemudian hasilnya kayak apa, anggarannya berapa. Jadi, selain narasi kegiatan dan hasil, dilampirkan juga laporan keuangannya sehingga masyarakat tahu dewan itu mau melaporkan kegiatan dan pengelolaan keuangannya. Atau, ketika mereka kunjungan ke luar negeri, apa yang dilakukan di sana, apakah hanya plesiran atau benar-benar melakukan kunjungan kerja. Itu yang menjadi sangat penting dalam konteks penggunaan anggaran karena anggarannya besar banget untuk membiayai mereka.

Bagaimana menilai penggunaan dana reses selama ini?

Hasil audit BPK menunjukkan banyak sekali catatan terkait penggunaan anggaran reses dan perjalanan dinas. Itu seharusnya menjadi momok, tetapi mereka tidak terusik dengan catatan BPK itu.

Keterbukaan seperti apa yang seharusnya dilakukan?

Kita selalu mendorong transparansi anggaran ini diproritaskan, tetapi sampai hari ini, kan, tidak. Masalah transparansi anggaran ini memang menjadi PR yang paling besar bagi DPR karena kalau yang lainnya, seperti informasi kegiatan-kegiatan, itu sudah banyak.

Transparansi DPR itu untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik yang selama ini mengalami keterpurukan. Ini pentingnya transparansi sebenarnya. (Dhk/P-3)